

**“POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG SANKSI PIDANA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH
OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

TESIS

Oleh

DIAN ANGGRAINI

(2202190083)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

“POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

DIAN ANGGRAINI

(2202190083)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Anggraini
NIM : 2202190083
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 14 November 2024



DIAN ANGGRAINI
NIM: 2202190083



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG SANKSI PIDANA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH
OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

Oleh:

Nama : Dian Anggraini
NIM : 2202190083
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 14 November 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.

NIP/NIDN: 951400/0304026301

Pembimbing II

Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.

NIP/NIDK: 211036/8931720021

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 191691/0305097105

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.

NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 14 November 2024 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Dian Anggraini
NIM : 2202190083
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Prof. Dr. Mompang L.Panggabean, S.H, M.Hum.

Sebagai Ketua

2. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.

Sebagai Anggota

3. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

Jakarta, 14 November 2024



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dian Anggraini

NIM : 2202190083

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **“POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



Jakarta, 14 November 2024

Meterai Rp. 10.000

DIAN ANGGRAINI

NIM: 2202190083

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Kasih dan Anugerah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulis berharap, dengan karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta memperkaya ilmu pengetahuan berkenaan dengan masalah “POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN”.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih hendak penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,M.BA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L selaku pembimbing tesis satu dan Bapak Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H. selaku pembimbing

tesis dua, yang mana di tengah-tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran, masukan, serta perbaikan dalam proses penulisan tesis ini.

5. Seluruh dosen, staf pengajar, dan staf administrasi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mata perkuliahan masing- masing serta membantu penulis dalam hal administratif dan kelengkapan teknis lainnya.
6. Keluarga penulis, Ayah TM. Silalahi dan Ibu D. Silitonga; serta Istri penulis Martini Simatupang, S.Kom dan kedua anak Ellena Bellvania Silalahi serta Raja Jose Martua Silalahi atas segala kasih sayang, motivasi dan doa kepada penulis untuk mencapai hasil terbaik.
8. Rekan-rekan penulis di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi sahabat yang memberikan ide, inspirasi dan motivasi, serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis dan penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 21 Oktober 2024

Dian Anggraini

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	15
F. Metode Penelitian	38
G. Rencana Sistematika Pembahasan	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	45
A. Teori Negara Kesejahteraan	45
B. Teori Tujuan Hukum.....	48
C. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	50
D. Tindak pidana.....	54
E. Sumber Daya Mineral dan Batubara	63

F. Izin Usaha Pertambangan.....	72
BAB III JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PATUT DIDUGA MERINTANGI DAN MENGGANGGU PELAKU USAHA PERTAMBANGAN.....	88
A. Tinjauan Umum tentang Kegiatan Usaha Pertambangan di Indonesia	88
B. Tindak Pidana Menghalangi Usaha Pertambangan oleh Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan yang Sudah Berizin dan Legal.	94
C. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Daerah Pertambangan yang Diduga Merintangi dan Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan (Pasal 162 UU Minerba).....	100
BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENGATURAN SANKSI PIDANA	88
A. Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Pertambangan.	88
B. Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara	130
C. Analisa Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Pertambangan.....	134
D. Analisa Ketidaksinkronan Pasal 162 UU Minerba dengan Pasal 66 UU Lingkungan Hidup dari Perspektif Kebijakan Kriminal	138
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	122
A. KESIMPULAN	122
B. SARAN	147
DAFTAR PUSTAKA	147

ABSTRAK

Dian Anggraini. 2024. Politik Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tesis. Program Studi Hukum Pidana, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Pembimbing I. Prof. Dr.Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum, Pembimbing II. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kriminalisasi terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar akibat aktivitas pertambangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dibahas dalam tesis ini yaitu Pasal 162 Undang-undang Sumber Daya Mineral Dan Batubara dengan Pasal 66 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang di dukung oleh yuridis empiris, yaitu dengan menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pertentangan norma antara Pasal 162 Undang-undang tentang sumber daya mineral dan batubara dengan Pasal 66 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga perlu dilakukan penyelesaian atas pertentangan norma tersebut diatas dengan melibatkan masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terhadap pasal-pasal yang mengandung unsur kriminalisasi terhadap masyarakat, seperti pasal 162 Undang-undang tentang sumber daya mineral dan batubara dengan Pasal 66 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mungkin pasal pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus dilakukan evaluasi dan revisi yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang sehingga membantu memastikan bahwa hukum yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa setiap pasal dalam hukum pidana tidak melanggar hak asasi manusia.

Kata Kunci: Tambang, Investasi, Kriminalisasi.

ABSTRACT

Anggraini, Dian. 2024. *Criminal Law Politics on Criminal Sanctions in Law Number 4 Year 2009 as Amended by Law Number 4 Year 2009. Criminal Sanctions in Law Number 4 of 2009 as Amended by Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management*. Thesis. Criminal Law Study Programme, Postgraduate Programme, Christian University Indonesia. Supervisor I. Prof. Dr Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum, Second supervisor. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.

The background of the problem in this research is the criminalisation of everyone who fights for the right to a healthy and unpolluted environment due to mining activities regulated in legislation as discussed in this thesis, namely Article 162 of the Mineral and Coal Resources Law with Article 66 of the Environmental Protection and Management Law.

This research uses normative juridical research methods supported by empirical juridical, which emphasises secondary data by studying and examining positive legal principles derived from literature and comparative law, as well as elements or factors related to the object of research as part of field research.

The results of the research show that there is a conflict of norms between Article 162 of the Law on Mineral and Coal Resources and Article 66 of the Law on Environmental Protection and Management, so it is necessary to resolve the conflict of norms above by involving the community.

The conclusion of this research is that articles that contain elements of criminalisation against the community, such as Article 162 of the Law on Mineral and Coal Resources with Article 66 of the Law on Environmental Protection and Management and possibly other articles in the applicable laws and regulations in Indonesia must be evaluated and revised involving the community in the lawmaking process so as to help ensure that the laws made reflect the needs and aspirations of the community and ensure that each article in the criminal law does not violate human rights.

Keywords: Mining, Investment, Criminalisation.